

HARMONI SOSIAL: Interaksi Sosial “Natural-Asimilatif” antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka

**Oleh:
Abdullah Idi**

**Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang
Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 30126**

Abstract

The Reformation era has influenced at least two effects for Indonesia as a state nation. First, reformation motivated the willingness of democratization as the foundation of legitimacy for the Indonesian existence in the future. Second, there is a greatest intention from this nation to create a good governance, transparency and accountability for public. Unfortunately, this policy has made disharmony and social conflict such as ethnic, religion, even culture group. At this point, the discussion of local wisdom is appropriate to support the unity of Indonesia as the nation. This paper tries to discuss one of the practical experiences for interethnic and religion that is Bangka-Malay-Islam for Chinese ethnic. The results of this research show that the harmony relationship happened for long time ago in nature without any manipulations on it. This fact supported the unity of Indonesia in the form of unity in diversity.

Keywords: Social-interaction, Malay-Bangka, Chinese ethnic, harmony, natural-assimilation.

Abstrak

Era Reformasi menghasilkan dua implikasi penting bagi Indonesia sebagai negara dan bangsa. Pertama, bangsa Indonesia menegaskan pada pilihan demokrasi sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan pengaturan pemerintahan. Kedua, adanya keinginan kuat bangsa ini untuk berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan publik. Efek samping dari hal ini adalah menyruaknya disharmoni dan konflik sosial baik dalam bentuk etnik, agama, maupun kelompok kultur. Pada konteks seperti ini, pembahasan mengenai “kearifan lokal” yang mendukung kesatuan keindonesiaan amat relevan. Tulisan ini mengkaji salah satu praksis dan pengalaman harmoni sosial lintas etnik dan agama yakni antara Melayu-Bangka-Islam dengan penduduk etnis China. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan harmoni itu telah lama berlangsung dan berjalan secara alami tanpa ada

“rekayasa” sosial secara sistematis. Fakta itu mendukung kesatuan keindonesiaan yang dibingkai dalam kesatuan dalam keragaman.

Kata kunci: interaksi sosial, Bangka-Melayu, Etnis China, harmoni, asimilasi-alamiah.

A. PENDAHULUAN

Kedatangan orang Cina daratan ke pulau Bangka memiliki sejarah panjang, yang diperkirakan sama dengan sejarah kedatangan mereka ke Nusantara.¹ Mereka sudah hadir di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu.² Orang Cina di Bangka diperkirakan telah hadir jauh sebelumnya, ketika Bangka di bawah kekuasaan Sriwijaya. Akan tetapi, kedatangan mereka dalam konteks formal dalam jumlah lebih besar tercatat pada awal abad ke-18, yakni ketika ditemukan dan dibukanya tambang timah di Bangka. Pada masa Sulthan ini, kuli-kuli Cina terus berdatangan ke Bangka untuk bekerja di tambang-tambang timah.³

Koneksi-koneksi khusus antara Cina Selatan dan Asia Tenggara telah membantu proses pengadaan imigran. Petani-petani Cina memerlukan dukungan penguasa setempat agar dapat bermigrasi ke Asia Tenggara. Mereka melakukan kegiatan tambang atau agrikultur untuk mencari laba dan melancarkan proses imigrasinya. Pada abad ke-18, timah merupakan salah satu komoditas penting di Asia Tenggara.

¹ D. Kwartanada, “Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, dalam LEKNAS-LIPI-YOI, *Penguasa Ekonomi dan Sosial Pengusaha Tionghoa*, (Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 24. Lihat pula: Abdullah Idi, *Sejarah Sosial Cina-Melayu*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm.29.

² Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian II Jaringan Asia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 12.

³ Pada awal abad ke-18, penduduk Bangka sudah menggali timah, dengan cara membuat sumuran, yang dikenal dengan sebutan Sumur Palembang. Pasir timah yang diperoleh kemudian dilebur dengan cara dibakar, mirip dengan cara melebur besi. Cara yang sudah dikenal baik oleh penduduk asli sebelumnya. Sebelum Bangka mengenal timah, telah dihasilkan peralatan-peralatan terbuat dari besi sebagai hasil bijih besi di Bukit Paku, di daerah Payng, Bangka Selatan Sejauh ini, belum ada data resmi yang menunjukkan belitung sudah menghasilkan timah, walaupun kuat dugaan bahwa timah terdapat di Palembang dan Lingga. Seperti halnya di Bangka, penduduk asli Belitung sudah mengenal kerajinan besiyang bahannnya didapat dari pulau Karimata dan Gunung Selumar. Lihat “Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung” (T.tp: t.p., t.t.) 2000, hlm. 13.

Penguasa-penguasa lokal, dalam kontak resmi dengan lingkungan istana mereka atau di sekitarnya, telah mendorong migrasi. Di Kesultanan Palembang, sebagai contoh, telah menggunakan utusan-utusan resmi (*tiko*) dari Cina untuk saudara tua (*dage*). Itu merupakan titel umum bagi kepala masyarakat rahasia (*secret society*). Mereka adalah penganut agama Islam. Mereka banyak melakukan perjalanan ke Cina Selatan, mungkin melalui saudara mereka atau suatu masyarakat rahasia. Mereka merupakan para utusan resmi istana yang berbakat. Hal ini tampak dari kemampuan mereka memindahkan para migran ke lingkungan istana, agar dapat bermigrasi penuh sebagai buruh untuk bekerja di tambang-tambang timah.⁴

Karena kebutuhan meningkatkan produksi timah, maka kehadiran kuli-kuli Cina seakan terus didatangkan ke Bangka. Tentu saja, dalam proses kedatangannya, emigran (kuli-kuli) jarang dalam posisi untuk membayar ongkos perjalanan mereka, terutama pada abad ke-18 ketimbang abad ke-19, ketika Eropa membayar impor kuli-kuli yang dipekerjakannya. Kuli-kuli tambang atau perkebunan dibawa ke kapal-kapal laut (*junks*) dari Cina Selatan ke pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. M.N.J. Court⁵ mengungkapkan bahwa setiap tahun, suatu agen konfiden dan kompeten dibawa oleh kapal kembali dari Palembang ke Cina, untuk menjemput mereka yang terpilih menjadi peserta emigrasi. Ongkos pelayaran dibiayai oleh administrator atau pemberi pinjaman uang (*money lender*), yang dikembalikan setelah para emigran memperoleh keuntungan dari kegiatan penambangan timah.

Jika merujuk pendapat Horton dan Hunt, terjadinya migrasi individu dan kelompok dipengaruhi faktor pendorong, penarik, dan sarana, maka kedatangan/migrasi orang Cina ke Bangka dapat dijelaskan pula dengan analisa ini:

⁴ Merry F. Sommers Heidhues, "Chinese Settlements in Rural South-East Asia: Unwritten Histories" dalam Anthony Reid (Ed.), *Sojourners and Settlers, Histories of South-East Asia and the Chinese* (Australia: South-Asia Publications Series, 1996), hlm. 172.

⁵ M.N.J. Court, *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country* (London: Prabury & Allen, 1821), hlm. 218-219.

Pertama, faktor pendorongnya adalah kemiskinan. Kemiskinan yang dialami, dapat dilihat dari jenis pekerjaan dalam kategori kasar, seperti sebagai kuli dan pedagang kecil.⁶ Selanjutnya, *krisis politik dan ekonomi*. Krisis politik dan dalam negeri Cina, seperti terjadi Perang Candu (1839), pemberontakan Taiping (1851), dan krisis ekonomi yang terjadi berulang kali sehingga mengakibatkan wabah kelaparan setelah gagal panen. Krisis-krisis itu telah mendorong ribuan migran Cina bagian Selatan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, termasuk ke Nusantara. Suku/etnis Hokkian merupakan migran pertama yang bermukim di Hindia Belanda dalam jumlah yang besar. Sifat kuat dalam berdagang melekat kuat pada suku ini.⁷

Kedua, faktor penariknya adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi oleh orang Barat di Asia Tenggara, telah menimbulkan arus masuk migran Cina secara besar-besaran di kawasan ini. Migran Cina yang datang lebih belakangan yang membentuk suatu komunitas "baru" (*xin keh*), sering terpisah dari mereka yang telah mapan dan terbentuk lebih dahulu. Jumlah *xin keh* lebih besar dan lebih dinamis dari pada migran sebelumnya. Tetapi karena kelompok baru, mereka kurang berintegrasi dengan masyarakat lokal. Mereka masih berbicara dalam bahasa Cina (dialek Cina atau Mandarin) dan masih menganggap diri mereka sebagai Warga Negara Cina. Mereka masih tetap berhubungan dengan Cina dan berorientasi kepada Cina, baik secara kultural maupun secara politis. Mereka juga disebut *zhongguo qiaomin* (Warga Negara Cina yang tinggal di luar negeri) atau *Huaqiao* (Warga Negara Cina yang bermukim di negara asing) oleh pemerintah Cina.⁸

Ketiga, faktor sarana transportasi. Sarana transportasi bagi migran Cina yang datang ke Nusantara, bukanlah suatu

⁶ J.A.C. Mackie, "Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu (Eds.), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 291.

⁷ G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa", dalam Melly G. Tan (Ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 7.

⁸ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 12-13.

hambatan, mengingat Cina daratan (*Mainland China*), ketika itu, telah memiliki kapal-kapal laut berteknologi tinggi.

Dalam perkembangannya, jumlah kuli Cina lebih banyak dibandingkan dengan kuli pribumi lokal (orang Melayu). Kuli pribumi lokal tidak memiliki andil yang memadai dalam sektor penambangan timah di Bangka, meskipun mereka sebagai perintisnya. Hal ini, disebabkan, *pertama*, pribumi lokal atau orang Melayu terbiasa hidup dengan kemurahan alam tanpa tantangan. *Kedua*, pada masa itu, hasil hutan diperkirakan lebih menarik ketimbang timah. Hasil hutan, seperti kayu, damar, madu, dll., pasarannya lebih mudah dan luas. Sedangkan penggunaan timah masih terbatas, dan pasarannya baru sebatas India dan Cina, dan dengan harga rendah sehingga tidak seimbang dengan kesulitan penambangannya. *Ketiga*, menggali timah merupakan pekerjaan yang berat dengan resiko yang tinggi, lagi pula dituntut keahlian memilih lokasi cadangan. Hal ini agaknya, kurang merangsang minat orang pribumi Melayu-Bangka karena mereka cenderung memandang masalah tersebut dari segi supranatural atas petunjuk dukun untuk memperoleh hasil pertambangan timah lebih banyak. Hal yang sama terjadi pula di Malaysia dan Thailand.⁹ Peran kuli timah dari pribumi Melayu-Bangka mulai tergeser, diganti oleh para kuli "impor" Cina yang diimpor Sultan Palembang, dan Bangka ketika itu berada di bawah kekuasaan Sultan Palembang.

Setelah perubahan kepemilikan aset timah, dari pihak Belanda ke pihak Indonesia yang disetujui pada 1953, telah berkonsekuensi terhadap perubahan populasi orang Cina di Bangka. Setelah adanya persetujuan pengambilan aset timah yang selesai pada 1960, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terhadap manajemen perusahaan timah. Sejumlah posisi penting dalam perusahaan timah mulai ditempatkan oleh tenaga karyawan pribumi Indonesia, termasuk pribumi Bangka

⁹ Jika raja-raja dan sultan-sultan di Thailand dan Malaysia memerlukan jumlah produksi timah lebih banyak untuk diekspor, mereka selalu mempercayakan upaya penambangan timah pada orang-orang Cina yang memiliki sifat kerja keras dan ulet. Hal yang sama pula terjadi pada masa sulthan Palembang, yakni pada sekitar awal abad ke-18, Sultan mendatangkan kuli-kuli Cina dari Batavia dan Malaka untuk menggali timah di Bangka. Lihat: (Soetjipto Soejitno, *Sejarah Timah Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 59.

dan Belitung. Setelah pemerintah Indonesia mengizinkan masuknya modal asing sejak 1967, terdapat tiga perusahaan asing yang menanamkan modalnya di industri penambangan timah, yakni PT. Koba Tin (di Bangka), PT. Broken Hill Prop. Indonesia (di Belitung) –kemudian dijual ke perusahaan Jerman PT. Preusag dan selanjutnya dijual ke perusahaan nasional PT. Gunung Kikara Mining– dan PT. Riau Tin (diperairan kepulauan Riau) yang selanjutnya mengundurkan diri karena jatuhnya harga timah pada awal 1980-an.¹⁰

Penurunan jumlah populasi orang Cina di Bangka dalam kurun waktu 1971-1983, dari 27% menjadi 21,3 %, terutama sebagai dampak dari adanya proses pergantian posisi di perusahaan timah di Bangka.¹¹ Sejumlah posisi penting di perusahaan timah yang semula diduduki oleh karyawan etnis Cina mulai diganti oleh karyawan pribumi Indonesia, termasuk pribumi Bangka dan Belitung. Misalnya, sejumlah kapten kapal keruk (*floating dredgers*) antara 1983-1986, lebih dari 50% sudah ditempati oleh orang pribumi Indonesia kelahiran di luar Bangka, Belitung, dan Singkep.¹² Meskipun para peneliti Belanda memikirkan bahwa lada mungkin cocok ditanam di Bangka, dalam kenyataannya, orang Cina telah menanamkan lada di Bangka setelah 1869. Penanaman lada di Bangka yang dibawah manajemen Cina ini telah berkembang hingga abad ke-19. Di Bangka, suatu yang mudah mengintegrasikan perkebunan lada dan penambangan timah dengan menggunakan tanah adalah bagian dari konsesi pertambangan yang mempekerjakan kuli-kuli Cina pengangguran.¹³

¹⁰ Departemen Pertambangan Indonesia, "Buku Tahunan Pertambangan Indonesia", 1989, hlm. 145.

¹¹ Berdasarkan Peraturan No. 3 Tahun 1976 dan Akte Notaris tanggal 2 Agustus 1976, Kedudukan Perusahaan Negara Tambang Timah diubah menjadi Perusahaan Terbatas Tambang Timah (Persero). Lalu terakhir menjadi PT. Timah, Tbk.

¹² Merry F. Sommers Heidhues, *Chinese Settlements in Rural Southeast Asia: Unwritten Histories....*", hlm. 2.

¹³ Kuli-kuli Cina ini mengalami gagal dalam pemeriksaan kesehatan untuk dapat dipekerjakan dibidang perkebunan lada. Selain itu, suatu alasan lain terjadinya perubahan pekerjaan (dari tambang menjadi petani lada), adalah karena pekerjaan di tambang ketika itu merupakan pekerjaan sangat melelahkan dan kurang dihargai, sementara memelihara sebidang tanah perkebunan lada sedikit membosankan, dan lagi pula dapat memberikan dukungan untuk suatu keluarga. Dengan mengikuti kuli-kuli Cina yang berkebun lada, masyarakat lokal melakan hal yang sama, menanam lada.

Permasalahan penurunan jumlah populasi dan pergeseran posisi etnis Cina di Bangka akan dijawab dalam artikel ini dengan menggunakan teori *natural-asimilatif* dan menggunakan pendekatan sejarah yang komprehensif.

B. INTERAKSI SOSIAL: ASIMILASI "NATURAL" & RELATIVELY FULL-ASSIMILATION

G. William Skinner (1996) mengatakan, sejarah migrasi Cina di Asia Tenggara memperlihatkan fenomena adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Hingga akhir abad ke-19, wanita Cina tidak diperkenankan meninggalkan Cina sehingga banyak migran Cina (berjenis kelamin laki-laki) di berbagai negara Asia Tenggara, misalnya Philipina, Jawa (Indonesia), dan Malaya (Malaysia), meperisteri wanita pribumi lokal. Ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, bila pemukiman migran berlokasi jauh dari pusat kota dan terisolasi dari keluarga-keluarga Cina lainnya. Namun, ada pula perkawinan dengan komunitas sendiri (Cina) yang menghasilkan Chinese Mestizos di Philipina, Chinese Peranakan di Jawa (Indonesia), dan Chinese Babas di Malaka (Malaysia).¹⁴

Interaksi sosial-asimilatif etnis Cina dengan etnis pribumi lokal di Hindia Belanda, dikatakan Skinner,¹⁵ tampak terjadi pula dalam kategori lainnya. *Pertama*, terdapat sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal yang merasa tidak cocok berkompetisi dengan dan bekerja di lingkungan komunitas Cina. Karena itu, mereka pergi meninggalkan komunitasnya, dan menikah dengan wanita pribumi, sekaligus mengadopsi pola hidup masyarakat asli/pribumi lokal. *Kedua*, kelahiran anak laki-laki Cina dipandang lebih penting dan berharga dibandingkan anak perempuan. Tidak jarang anak (bayi) perempuan diberikan

Sehingga, tidak mengherankan bila sebelum Perang dunia II, Bangka mampu mengeksport 80% lada putih, lebih besar dari Lampung dan Sumatera Selatan, sebagai penghasil lada di negeri Hindia Belanda. Lihat: (Merry F. Sommers Hiedhues, "Chinese Settlement....", hlm. 149.

¹⁴ G. William Skinner, "Creolized Chinese Societies in Southeast Asia", dalam Anthony Reid (Ed.), *Soujourners and Settlers, Histories of South east Asia and Chinese*, (Australia: South East Asia Publication Series, 1996), hlm. 53.

¹⁵ G. William Skinner, *ibid.*, hlm. 53.

kepada keluarga pribumi (adopsi). Anak perempuan adopsi itu tidak mengalami hambatan apapun dalam berakulturasi maupun berasimilasi, karena sejak bayi sudah dianggap dan hidup di lingkungan orang pribumi. *Ketiga*, sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal menikah dengan wanita pribumi lokal. Anak laki-laki dari hasil perkawinan itu diyakini sebagai Cina, dan suatu ketika harus siap kembali ke Cina Daratan (*Mainland China*). Sedangkan, anak perempuan dapat tinggal bersama ibunya yang pribumi, sehingga pada akhirnya akan menjadi pribumi lokal pula. *Keempat*, ketika keutuhan keluarga (keluarga perkawinan laki-laki Cina dan wanita pribumi) tidak dapat dipertahankan karena laki-laknya pergi kembali ke Cina atau karena perceraian, maka anak laki-laki biasanya ikut ayahnya (ke Cina). Sedangkan, anak perempuan ikut ibunya yang pribumi, selanjutnya menjadi identitas pribumi.

Interaksi sosial-asimilatif kuli Cina dan pribumi Melayu-Bangka telah terjadi dalam proses waktu yang panjang. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, kuli-kuli Cina datang ke Bangka, pada masa prakolonial, telah melakukan asimilasi perkawinan, dengan mengikrarkan diri masuk Islam atau “masuk Melayu”.¹⁶ Asimilasi kuli Cina dan pribumi Melayu-Bangka tersebut telah terjadi relatif sempurna yang pada hampir semua level, baik level asimilasi kultural, dan marital/perawinan.¹⁷ Interaksi sosial asimilatif ini masih berlangsung hingga kini yang terjadi pada level dan derajat yang berbeda.

Amran Harun (1967) mengungkapkan bahwa (asimilasi) perkawinan (*marital*), dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. *Pertama*, perkawinan laki-laki Melayu-Bangka dan wanita Cina, dengan melakukan pengislaman wanita Cina terlebih dahulu. Selanjutnya, pasangan dinikahkan didepan penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, berdasarkan syari’at

¹⁶ Bagi orang Melayu, Islam merupakan suatu elemen kunci sebagai identitas etnis Melayu. Hampir semua orang Melayu adalah Muslim, dan seorang Melayu yang menolak Islam secara legal, dipandang sebagai bukan orang Melayu lagi. Lihat Khairul A. Mastro, Putai Jin dan Martin Cooper, “Malay Culture and Personality”, *Journal of American Behavioral Scientist*, Vol. 44, No. 1, September 2000, hlm. 96.

¹⁷ Asimilasi sempurna itu telah berlangsung kurang lebih dua abad, yakni sejak awal pembukaan tambang timah pada awal abad ke-18 hingga kedatangan migran Cina ke Bangka secara formal sebelum abad ke-20. Sebutan formal dimaksudkan ketika Belanda mulai intervensi dalam pengelolaan produksi timah dan mengontrol Bangka.

Islam, dengan penghulu sebagai wali hakim bagi wanita Cinanya. Wanita Cina yang sudah diislamkan tersebut, oleh masyarakat Melayu dan masyarakat Cina, dikatakan masuk golongan Melayu atau "masuk Melayu". Hubungan hukum antara wanita Cina tersebut dengan orang tuanya dianggap putus, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Perkawinan jenis ini lazim terjadi di Bangka. *Kedua*, perkawinan antara laki-laki Cina dan wanita Melayu-Bangka. Perkawinan bentuk ini dimulai dengan pengislaman lalu penghitanan laki-laki Cina. Kemudian, pernikahan dilakukan dengan ijab kabul dari wali Melayu-Bangka.¹⁸ *Ketiga*, perkawinan laki-laki Melayu dan wanita Cina yang berstatus anak angkat (adopsi). Wanita Cina tersebut, sejak kecil sudah masuk Islam atau "masuk Melayu". Sehingga proses perkawinan dapat langsung dilaksanakan. Asimilasi seperti ini merupakan asimilasi sempurna karena mencakup asimilasi mental dan biologis.¹⁹

Hasil penelitian disertasi Abdullah Idi (2006) memperlihatkan bahwa interaksi sosial orang Cina dan Melayu-Bangka tersebut telah terjadi pada sejumlah level asimilasi (*multi-stages of assimilation*, yakni asimilasi struktural, asimilasi kultural, asimilasi marital/perkawinan, asimilasi identifikasi, dan asimilasi tanpa prasangka/diskriminasi. Hasil penelitian ini

¹⁸ Di Bangka tidak diterapkan aturan hukum perkawinan campuran, karena biasanya perkawinan dilangsungkan menurut cara orang Melayu Islam, bukan menurut perkawinan Cina. Begitu pula akibat hukumnya. Laki-laki Cina dianggap oleh masyarakat telah masuk ke dalam golongan orang Melayu sepanjang yang bersangkutan mengganti namanya dengan nama-naa orang Islam, dan tidak *murtad* (kembali menjadi orang Cina). Perkawinan bentuk ini tidak sebanyak terjadi sebagaimana halnya perkawinan jenis pertama. Laki-laki Cina yang telah masuk Melayu atau masuk Islam tersebut di Bangka dinamakan "muhalab" (*mu'allaf*).

¹⁹ Wanita Melayu tadi sebenarnya (menurut anggapan masyarakat), dari aspek biologisnya adalah asli berdarah Cina. Maka perkawinannya dengan laki-laki Melayu mengakibatkan terjadinya asimilasi biologis. Ini dikatakan sebagai suatu bentuk asimilasi lebih sempurna, karena asimilasi yang dicita-citakan adalah asimilasi mental dan biologis. Dengan melalui pengangkatan anak, menjadi Islam, dididik dalam keluarga dan masyarakat Melayu, dan setelah dewasa, wanita Cina tersebut sudah bermental Melayu. Pengangkatan anak Cina merupakan suatu cara asimilasi mental. Artinya, peleburan diri dan mental menjadi orang pribumi Melayu-Bangka, sehingga mental Cinanya tidak tampak lagi, meskipun ciri-ciri biologis kecinaannya masih tampak. Lihat Amran Harun, "Pengaruh Agama Islam dalam Hukum Adat di Bangka", *Skripsi Fakultas Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1967), hlm. 115.

mendukung dan sekaligus merevisi teori asimilasi Milton M. Gordon (1964) tentang multi-tingkatan asimilasi (*multi-stages assimilation*). Dari tujuh tingkatan asimilasi dalam teori Gordon, terdapat lima tingkatan asimilasi orang Cina dan Melayu di Bangka. Teori asimilasi Gordon tetap relevan digunakan dalam penelitian asimilasi, meskipun sulit diaplikasikan dengan utuh, karena setiap masyarakat cenderung memiliki keadaan struktur sosial dan ekonomi berbeda.²⁰

Interaksi sosial yang asimilatif itu terjadi secara natural dan relatif sempurna (*natural and relatively full-assimilation*) dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Bangka. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka sebenarnya merupakan respons terhadap adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang karenanya dapat berdampak positif maupun negatif terhadap asimilasi. Dalam penelitian ini, perubahan sosial itulah yang menyebabkan terjadinya *natural and relatively full-assimilation*. Perubahan sosial yang menjadi pendorong terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka adalah: keadaan ekonomi masyarakat Bangka yang relatif berimbang; etnis Melayu sebagai mayoritas dan etnis Cina minoritas dalam *size*; karakteristik etnis Melayu yang akomodatif, toleran, egaliter, terbuka (*extrovert*); status *elite* pada etnis Melayu; pemukiman relatif menyebar secara etnis; sistem pendidikan yang demokratis dan tanpa diskriminatif; agama Islam sebagai mayoritas dalam *size*; dan sistem politik yang demokratis.²¹

Sementara itu, perubahan sosial yang cenderung menjadi kendala bagi asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka, adalah: perubahan ekonomi, yakni mulai berkurangnya peranan ekonomi timah dan penyempitan lahan perkebunan rakyat; perubahan pendidikan, yakni semakin majunya anak-anak Cina dan Melayu yang berpengaruh terhadap pola pikir, pergaulan, dan wawasan mereka, termasuk dalam hal persepsi dan perilaku sosial sesama mereka maupun dengan anak-anak berlainan etnis; dan perubahan kehidupan keagamaan, yakni adanya

²⁰ Abdullah Idi, *Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2009), hlm. 270.

²¹ *Ibid.*, hlm. 270-271.

peningkatan pengetahuan agama anak-anak Cina dan Melayu yang memperkuat keyakinan terhadap ajaran agama mereka masing-masing berpengaruh terhadap pola pikir, pergaulan, dan wawasan mereka, serta pola perilaku sosial mereka dengan anak-anak berlainan etnis.²²

Suatu keadaan interaksi sosial etnis Cina dan etnis Melayu-Bangka yang terasimilatif dan terjadi "natural" dan relatif sempurna (*natural and relatively full-assimilation*), terjadi karena adanya respons simbolik terhadap keadaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang relatif berimbang (*equilibrium*), dengan parameter-parameter sosial yang terinterseksi (*intersecting social parameters*). Dilihat dari pendekatan interaksionisme simbolik Blumerian, tampak bahwa asimilasi orang Cina dan Melayu itu muncul sebagai makna simbolik (makna laten) dari interaksi individu atau kelompok etnis minoritas Cina dengan individu atau kelompok etnis mayoritas Melayu, sebagai fenomena sosial yang tampak. Pemahaman makna dari simbol-simbol itu digunakan untuk memahami makna laten dibalik interaksi sosial orang Cina dan Melayu yang berasimilasi.²³

Karena itu, hasil penelitian ini telah membantah (*counter-attack*) terhadap tesis G.E. Simpson dan J.M. Yinger (1972). Dikatakan Simpson dan Yinger mengatakan bahwa karakteristik-karakteristik kelompok minoritas: (1) kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks; (2) memiliki ciri-ciri yang melemahkan terhadap diri sendiri (*self-esteem*); (3) kelompok minoritas merupakan kelompok yang memiliki kesadaran kelompok yang tinggi, yang tumbuh karena masing-masing anggota memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri yang menguntungkan atau merugikan; (4) keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya walaupun tidak

²² Dari aspek ini, penelitian ini dapat dipandang berhasil merevisi teori asimilasi Gordon yang tidak menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses asimilasi pada suatu masyarakat. Penelitian ini dengan menggunakan teori sosial dapat dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan masalah asimilasi, dan telah mampu membuktikan bahwa asimilasi terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lihat *ibid.*, hlm. 271.

²³ *Ibid.*, hlm. 271.

ada lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol; dan (5) anggota kelompok minoritas baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan memiliki kecenderungan untuk kawin dengan orang-orang dari kelompok sendiri.

Pada level mikro, kasus etnisitas, tentang interaksi sosial etnis Cina dan Melayu-Bangka merupakan suatu hal “unik”, dimana hubungan etnis migran Cina ini dan pribumi Melayu-Bangka tampak asimilatif dan “natural”. Hal ini, diharapkan dapat memberikan suatu refleksi penting bagi bangsa ini secara makro, dimana masyarakatnya tampak pluralistik. Populasi Bangka setidaknya memiliki sekitar 80% penduduknya etnis Melayu yang mayoritas beragama Islam. Dalam sejarah asimilasi Cina dan Melayu-Bangka, agama Islam ternyata bukanlah suatu kendala bagi terjadinya asimiasi antara orang Cina dan Melayu-Bangka. Fakta sosial-historis ini, tentang asimilasi Cina dan Melayu yang cenderung terjadi secara “natural”. Hal ini, menunjukkan sebagai *counter-attack* pula terhadap tesis G. William Skinner yang menyatakan agama Islam sebagai kendala asimilasi orang Cina dengan pribumi Indonesia.²⁴

Dalam perspektif teori fungsionalis, seperti Merton dan Parson, masyarakat adalah suatu sistem yang stabil dari kelompok-kelompok yang bekerja sama, yang di dalamnya terdapat konsensus-konsensus. Seperti sebuah tubuh, keduanya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan melahirkan sebuah pola hubungan yang bereseimbangan (*equilibrium*).²⁵ Kendatipun kondisi saling berhubungan antarbagian masyarakat tersebut sesekali diwarnai ketegangan dan konflik, namun, sebagai sebuah sistem, selalu ada kebutuhan untuk menjalin kerjasama antarbagian dan tetap menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) demi menjaga keseimbangan hubungan dalam masyarakat.

²⁴ Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, hlm. 201.

²⁵ Talcot Parson, “A Paradigm for the Analysis of Social System and Change”, dalam N.J. Demerath and A. Richard Peterson (Ed.), *Sistem of Change and Conflict* (New York: The Free Press, 1966), hlm. 189-194; Robert K. Merton, *Social Theories and Social Structure* (Illionis: The Free Press, 1949).

C. REFLEKSI: DARI BANGKA UNTUK INDONESIA

Adalah suatu kehendak Sang Khalik, *sunnatullah*, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa pluralistik, seperti diungkapkan J.S. Furnivall.²⁶ Secara totalitas, J. Nasikun mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat tumbuh berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama.²⁷ Orang Belanda, Cina, dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing, sebagai tanda tidak memiliki kehendak bersama (*common will*).²⁸

²⁶ J.S. Furnivall mengatakan, sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka berkuasa dan mereka dikuasai mempunyai perbedaan ras. Orang Belanda sebagai kelompok minoritas jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga di negeri sendiri. Orang Timur Asing memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common-will*), di mana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras. Masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing. Seperti orang Cina sebagaimana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negeri sendiri. Lihat: (J.S. Furnivall, "Plural Societies", dalam *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, New York, 1980, pp. 86-103; dan Abdullah Idi, "Etnisitas, Agama, dan Integrasi bangsa: Analisis Sosiologis Terhadap PBM No.9 & No.8/2006", *Orasi Ilmiah*, dalam rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 29 Nopember 2006), hlm. 3.

²⁷ J.S. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 287-302.

²⁸ Pada bidang ekonomi, tidak adanya *common-will* itu dapat dilihat dari tidak adanya permintaan sosial (*social demand*) dalam masyarakat secara total. Tapi, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, *social demand* itu belum terorganisir dengan baik melainkan bersifat sektoral dan bukan *social demand* yang dihayati bersama oleh elemen-elemen masyarakat. Hal itu telah menjadi "sumber" yang membedakan karakter ekonomi pluralistik (*plural economy*) pada masyarakat homogen. Proses ekonomi pada masyarakat pluralistik dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*), sedangkan pada masyarakat homogen dikendalikan oleh adanya *common will*. Hubungan-hubungan sosial di antara elemen masyarakat pluralistik hanya dikendalikan oleh proses ekonomi dengan produksi barang material sebagai tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Itu karena pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan ras yang mana tipe ras mempunyai fungsi produksi tersendiri. Orang Belanda di bidang perkebunan, orang Pribumi di bidang pertanian, dan orang Cina di bidang pemasaran

Dalam masyarakat pluralistik Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas dianut penduduk Indonesia (sekitar 85-90%), yang juga sekaligus negara yang penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Umat Islam Indonesia, karenanya, memiliki peranan terdepan dan strategis dalam memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998, konflik sosial bernuansa suku/etnis, agama, ras, dan antargolongan (SARA), seakan terus terjadi. Kapan dan di mana akan terjadi seakan sulit pula terdeteksi. Faktanya, di penghujung 2010, terdapat empat konflik sosial bernuansa SARA.²⁹ Terjadi pula kasus bom bunuh diri di sebuah masjid Markas Brimob-Cirebon (2011); dan bom bunuh diri sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah (September 2011). Sejumlah orang telah meninggal dunia dan luka-luka pun tidak dapat dihindari dalam kasus SARA ini. Kerugian harta benda juga tidak sedikit jumlahnya, yang pada akhirnya akan mempersulit kehidupan warga yang bertikai.³⁰ Keadaan ini tentunya tidak dikehendaki semua pihak, karenanya perlu diwaspadai dan dicari akar permasalahan konflik sosial tersebut guna menghindari korban jiwa dan harta benda yang lebih besar lagi. Jika terus terjadi, hal ini bertanda bangsa ini dipandang kurang menghargai hak hidup dan martabat manusia yang sesungguhnya memerlukan perlindungan negara.

Kasus HKBP-Bekasi terjadi, salah satu faktor penyebabnya, lebih dikarenakan lemahnya peran dan komitmen pemerintah tentang implementasi peraturan kerukunan antarumat beragama. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diketuai kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) belum sepenuhnya dilaksanakan. Kepala daerah umumnya kurang menyadari tentang pentingnya peran pemerintah dalam implementasi peraturan pemerintah tentang kerukunan umat beragama. Pemerintah dapat

yang sekaligus sebagai *mediator* di antara keduanya. Seperti dikutip dari Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, hlm. 213,

²⁹ Kasus-kasus yang dimaksudkan adalah kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bekasi (agama), Tarakan-Kalimantan Timur (etnis), Jakarta Selatan (geng preman/golongan), dan Cislada/Ciampea-Bogor (intern agama).

³⁰ Ribuan pengungsi, terutama pengungsi etnis pendatang pada kasus Tarakan, telah menyedot dana Pemda Tarakan dalam jumlah cukup besar.

berupa pengawasan dan bahkan pemberian sanksi tentang setuju atau tidak setuju terhadap usulan pendirin rumah ibadah. Karena lemahnya peran pemerintah ini, terutama Kantor Kementerian Agama setempat, sangat mungkin di antara pengurus dan elit umat beragama mencoba dan berspekulasi mengabaikan aturan berlaku. Tentu saja, namanya spekulasi, ada yang berhasil dan tidak berhasil dalam mendirikan rumah ibadah. Karenanya, proses penanganan hukum terhadap konflik sosial bernuansa agama memerlukan kehati-hatian dan konsistensi, jangan sampai ada pihak umat beragama manapun merasa dirugikan. Peraturan Pemerintah tentang kerukunan umat beragama itu hendaknya tetap menjadi rujukan dalam mendirikan rumah ibadah.

Kasus kerusuhan antara etnis pendatang (Bugis) dan etnis lokal (Kalimantan Timur) pada 2010, merupakan salah satu bentuk pengulangan kerusuhan etnis yang pernah terjadi sebelumnya, seperti di Sampit (Kalimantan Barat). Dapat diduga bahwa faktor "kecemburuan" sosial-ekonomi dan budaya (stereotype etnis) menjadi penyebab konflik itu. Etnis pendatang biasanya lebih agresif dalam mencari peluang ekonomi demi penghasilan dan martabat yang lebih baik bagi keluarganya yang sering kali menjadi "sumber" potensi konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya. Aspek sosial budaya, terutama *stereotype* etnis juga tidak jarang menjadi "sumber" potensi bagi kedua belah pihak etnis pendatang dan etnis lokal. Klaim-klaim dan lebel-lebel, baik yang positif yang diberikan kepada etnis sendiri maupun label-label negatif terhadap etnis lain, merupakan suatu hal sensitif terhadap munculnya "sumber" dan potensi konflik. Setidaknya, bila dilihat kasus Sampit.

Keterkaitan kerusuhan antargeng di Jakarta Selatan (2010), antara geng Flores dan Ambon (sama-sama dari Indonesia Timur), diperkirakan tidak terlepas dari perebutan "gengsi" dan "sumber-sumber" ekonomi. Kerusuhan ini telah menelan korban setidaknya lima orang pemuda dan puluhan luka parah dari etnis berbeda. Meskipun sama-sama dari Indonesia Timur dan mungkin juga dengan identitas agama yang sama, mereka rela saling melukai dan bahkan saling membunuh hanya karena harkat dan martabat berupa "gengsi"

dan perebutan “sumber” ekonomi. Mereka merantau jauh-jauh dari daerah asalnya dengan tujuan mencari nafkah dan perbaikan ekonomi keluarga. Karena harus diakui pula bahwa dengan gemerlapnya Jakarta dan penuh sesak dengan beragam manusia, telah menjadi faktor pendorong atau daya tarik dan menjadi harapan masa depan bagi sebagian orang.³¹

Adapun kasus kerusuhan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan rumah para jemaah Ahamadiyah di Cisalada, Ciampea, Bogor, lebih tampak sebagai konflik sosial bernuansa agama, konflik intern umat beragama. Konflik aliran Ahamadiyah di Indonesia lebih dikarenakan perbedaan mendasar antara umat Islam umumnya dengan Ahmadiyah. Konflik ini seakan tidak pernah terselesaikan meskipun sudah ada peraturan yang melarang tentang keberadaan Ahmadiyah.³²

Jauh sebelumnya, terutama sejak 1997, ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa tersebut seakan tidak terlepas dari perjalanan bangsa ini. Hingga kini (2011), bangsa ini seolah-olah belum mampu keluar dari berbagai masalah nasional. Masalah nasional itu, antara lain: korupsi, rawan pangan/kemiskinan, pengangguran, premanisme, pencemaran lingkungan, konflik etnis/agama, terorisme, eksploitasi kekayaan alam, separatisme, dan lain-lain. Padahal, kondisi demikian, akan berdampak buruk terhadap proses melemahnya toleransi- kebersamaan, proses disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.

Sejumlah kasus di atas merupakan ancaman internal berbangsa yang mengindikasikan bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa masih menjadi “agenda” penting ke depan. Setiap elemen bangsa harus berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam memperbaiki dan mempertahankan eksistensi bangsa ini. Umat

³¹ Iklim kehidupan yang cenderung kasar dan penuh dengan suasana kekerasan, suatu hal biasa bagi mereka bila ingin eksis. Bidang pekerjaan yang dipilih, biasanya terutama bertalian dengan petugas keamanan (*security*) pada kantor, perusahaan, tempat hiburan, pasar, dan parkir. Dengan latar belakang pendidikan yang pada umumnya rendah dan menyadari sulitnya memperoleh pekerjaan yang di luar kompetensi, pilihan pekerjaan itu adalah pilihan terbaik. Perkelahian dan seakan menjadi korban suatu resiko yang harus diterima.

³² *Kompas*, 3/10/2010.

Islam, salah satu elemen penting dari penganut agama mayoritas dalam bangsa pluralitas ini, memiliki peran dan fungsi signifikan dan strategis sebagai "perekat" integrasi sosial dan integrasi bangsa.³³ Ancaman disintegrasi bangsa bisa pula bersifat ancaman eksternal yang berasal dari luar atau ancaman stabilitas terhadap kedaulatan bangsa yang bisa bersumber dari negara lain, seperti beberapa kasus bertalian dengan konflik perbatasan Malaysia-Indonesia.³⁴

Timo Kivimaki (2005) mengatakan, hampir semua daerah yang bergejolak isu separatisme (misalnya Aceh, Papua, Riau, Maluku), memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas, hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial yang memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme.³⁵

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia, di satu sisi, merupakan "berkah" dan "kekayaan" yang pantas disyukuri. Di

³³Abdullah Idi, "Islam dan Pluraisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", dalam *Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Idea Press dan Corpus Jogakarta, 2010), hlm. 1-21.

³⁴ Perlu menjadi catatan bersama, bahwa setiap terjadi kasus konflik dengan negara jiran, antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia sering berada pada posisi lemah. Sebelumnya, sebanyak sepuluh (10) kali Indonesia melayangkan nota protes kepada Malaysia, namun tidak satu pun ditanggapi serius. Kasus Ligitan-Sipadan, tindakan provokatif kapal perang tentara Diraja Malaysia di Teluk Ambalat, dan Penangkapan tiga (3) petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh tentara Diraja Malaysia, menandakan diplomasi Indonesia berada pada posisi lemah. Lihat: (Abdullah Idi, "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia", *Berita Pagi*, 2/9/2010).

³⁵ Namun demikian, tiap daerah tampak memiliki motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatisme. Di Papua, tokoh pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob Prai, mengatakan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan. Seperti Belanda tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro (alm.), mengatakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan kekuasaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan. Banyak tokoh politik asli Republik Maluku Selatan (RMS) memperjuangkan kemerdekaan karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan dan ancaman militer. Lihat: (Timo Kivimaki, *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Glendd Smith, Roger Tol (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-, 2005), hlm. 107-108.

sisi lain, pluralistik justru berakibat sebaliknya, menempatkan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial³⁶ dan disintegrasi bangsa, seperti diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel, berikut:

*After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regional resistance movements, the inability to corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of "messy stages". In short, they predict further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state.*³⁷

Syafuan Rozi³⁸ mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena buruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi cepat marah dengan orang lain. Frans Magnis Suseno³⁹ mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia. *Pertama*, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras, etnik, dan daerah. *Kedua*, berhubungan dengan akumulasi perasaan diri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). *Ketiga*, perilaku seorang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. *Keempat*, sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

³⁶ Abdullah Idi & Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006), hlm. 113.

³⁷ Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (Eds.), "Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories", dalam *Indonesia in Transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1-2.

³⁸ Safuan Rozi, "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No. 1/2003, hlm. 91-92.

³⁹ Frans Magnis Suseno, "Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 121-122.

Suparlan mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih rentan terhadap potensi konflik.⁴⁰ Potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk "sumber-sumber sosial" (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan mempengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Menyadari Indonesia sebagai bangsa pluralistik yang rentan terhadap potensi konflik sosial, pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan etnisitas. R. William Liddle mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru misalnya telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya.⁴¹ Pemerintah reformasi B.J. Habibie (1997-1999), kebijakan etnisitas lebih tampak pada bidang sosial budaya dan politik. Habibie memberi kesempatan etnis Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai politik dan diperkenankan untuk mempraktekkan adat-istiadat dan budaya leluhur. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000, dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan praktik adat-istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) memperkuat kembali legalitas praktik adat-istiadat dan seni budaya Cina. Rezim Soesilo Bambang Yoedoyono (2004-2009 dan 2009-2014) lebih memfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antaretnis (UU PDRE) dan kerukunan umat beragama (PBM-KUB No.9 dan N0. 8/2006).⁴²

⁴⁰ Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 70.

⁴¹ R. William Liddle, "Coercion, Co-optation, and the Management of Ethnic Relations in Indonesia", *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*, Editor: Michael E. Brown and Sumit Ganguly, CSIA Studies in International Security, (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1997), hlm. 282-283.

⁴² Abdullah Idi, "Bangka, Sejarah Sosial Cina dan Melayu", hlm. 216-217.

D. PENUTUP

Bangka hanyalah salah satu pulau kecil dan hanyalah bagian terkecil dari Indonesia. Akan tetapi, model etnisitas dan interaksi sosial antara etnis Cina dan Melayu yang terasimilasi pada level relatif sempurna meminjam istilah Molten M. Gordon, dan cenderung “natural”, memiliki arti dan makna tersendiri bagi upaya pembinaan etnisitas dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Implementasi sejumlah kebijakan etnisitas sebagai respons terhadap pluralitas-Indonesia, sebagai *sunnatullah*, tidak akan sempurna dan membawa hasil optimal, jika masih terjadi ketimpangan tajam terhadap struktur kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama. Kebijakan otonomi daerah hendaknya memiliki komitmen dan strategis dalam pemberdayaan etnisitas dalam berbagai bidang kehidupan tersebut. Dari kasus etnisitas di Bangka, setidaknya memberi suatu pelajaran penting bagi Indonesia bahwa integrasi sosial dan harmoni sosial akan mungkin terjadi apabila struktur sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama menunjukkan keseimbangan (*equilibrium*) di tengah kehidupan masyarakat pluralistik Indonesia. Selain itu, pluralitas dan integrasi sosial menghendaki adanya kebijakan pemerintah yang mampu “membela” (*affirmative*) terhadap berbagai kebutuhan beragam etnis dan agama dengan mengedepankan rasa keadilan. Hal ini, pada akhirnya, diharapkan akan berdampak positif terhadap penguatan integrasi sosial dan integrasi bangsa yang akhir-akhir ini mengalami proses pelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung" (T.tp.: t.p., 2000).
- Anonim. "Buku Tahunan Pertambangan Indonesia" (Jakarta: Departemen Pertambangan Indonesia, 1989).
- G. William Skinner. "Creolized Chinese Societies in Southeast Asia", dalam Anthony Reid (Ed.). *Sojourners and Settlers, Histories of South-East Asia and Chinese*. Australia: South East Asia Publication Series, 1996.
- Harun, Amran "Pengaruh Agama Islam dalam Hukum Adat di Bangka". *Skripsi Fakultas Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1967.
- Heidhues, Merry F. Sommers. "Chinese Settlements in Rural South-East Asia: Unwritten Histories" dalam Anthony Reid (Ed.). *Sojourners and Settlers, Histories of South-East Asia and the Chinese*. Australia: South-Asia Publications Series, 1996.
- Idi, Abdullah. "Etnisitas, Agama, dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis terhadap PBM No.9 & No.8/2006". *Orasi Ilmiah*, dalam rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 29 Nopember 2006.
- Idi, Abdullah. *Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2009.
- Idi, Abdullah. "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia" *Berita Pagi*, 2/9/2010.
- Idi, Abdullah. *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.
- Idi, Abdullah & Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- J.S. Furnivall. "Plural Societies". Dalam *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers. New York: Oxford University Press, 1980.

- J.S. Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Kwartanada, D. "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", *Penguasa Ekonomi dan Sosial Pengusaha Tionghoa*. Jakarta: Leknas-LIPI-YOI-Gramedia, 2000.
- Khairul A. Mastro, Putai Jin dan Martin Cooper. "Malay Culture and Personality". *Journal of American Behavioral Scientist*, Vol. 44, No. 1, September 2000.
- Kivimaki, Timo. *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific: Histories, Political Economies, and Policies*. Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Glendd Smith, Roger Tol. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI)-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV, 2005.
- Kompas*, 3/10/2010.
- Lombard, Dennys. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian II Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mackie, J.A.C. "Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai". dalam Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu (Eds.). *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Merton, Robert K. *Social Theories and Social Structure*. Illionis: The Free Press, 1949.
- M.N.J. Court. *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country*. London: Prabury & Allen, 1821.
- Nordholt, Henk Schulte dan Samuel, Hanneman (Eds.). "Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories", *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Parson, Talcot. "A Paradigm for the Analysis of Social System and Change", dalam N.J. Demerath and A. Richard Peterson (Ed.). *Sistem of Change and Conflict*. New York: The Free Press, 1966.
- Rozi, Safuan. "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No. 1/2003.

Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 1999.

Suseno, Frans Magniz. "Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan". Dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Indonesia-Netherland Coperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003.

Skinner, G. William. "Golongan Minoritas Tionghoa". Dalam Melly G. Tan (Ed.). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia, 1979.